

**REKONSTRUKSI PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI TAHAPAN  
UJI KOMPETENSI (*FIT AND PROPER TEST*) DALAM RANGKA MEMBANGUN  
KAPABILITAS ANGGOTA LEGISLATIF**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**IRMAYADI SASTRA  
NIM : 201620380211020**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Agustus 2018**

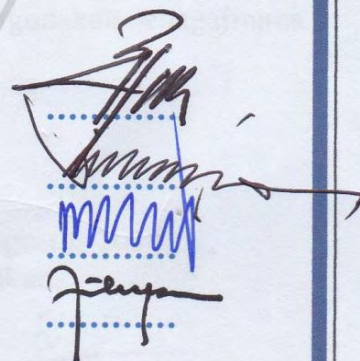
# TESIS

**IRMAYADI SASTRA**  
**201620380211020**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Sabtu / 11 Agustus 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji	: Dr. Sulardi
Sekretaris / Penguji	: Mokh. Najih, Ph.D
Penguji	: Dr. Haris Tofly
Penguji	: Dr. Fifik Wiryani





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **IRMAYADI SASTRA**

NIM : **201620380211020**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **REKONSTRUKSI PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI TAHAPAN UJI KOMPETENSI (FIT AND PROPER TEST) DALAM RANGKA MEMBANGUN KAPABILITAS ANGGOTA LEGISLATIF** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Agustus 2018

Yang menyatakan,



**IRMAYADI SASTRA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, tiada kata puji yang pantas dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, maha pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis diberikan kesehatan lahiria maupun kesehatan batinia dalam menyusun tesis yang berjudul: *“Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif Melalui Tahapan Uji Kompetensi (Fit And Proper Test) Dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Lgislatif”* akhirnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu, lewat pengorbanan, dedikasi serta perjuangan yang memerlukan tenaga, pikiran, waktu dan biaya dalam menuntaskannya.

Syalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw, beliau adalah suritauladan bagi seluruh ummat manusia, sang pembawa risalah kebenaran, tokoh revolusioner sejati yang tiadaandingannya sampai akhir zaman beserta keluarga dan sahabatnya, dan para pengikutnya, semoga kita memperoleh syafaatnya kelak di kemudian hari. Aamiin.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, hal ini disebabkan keterbatasan, ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena, itu penulis mengharap

keritikan, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak demi menyempurnakan tesis ini.

Selesainya penyusunan tesis ini tidak terlepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis dengan tulus, ikhlas mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum, selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si, selaku pembimbing utama dalam penyusunan tesis ini, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Seluruh staf pangajar dan pengampuh mata kuliah pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan pula baik di dunia maupun di akhirat.
6. Para staf dilingkungan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang selama ini telah membantu penulis dalam hal administrasi.
7. Ibu ku Darni, ia adalah sumber dan cahaya kehidupanku yang tidak pernah padam semangatnya, mengasihi, menyangi dan membiayai seluruh kebutuhan

ku selama ini, dan beliau tidak pernah merasa lelah untuk menasehati serta mendoakan ku, dan persembahkan kepada ayah ku Alm. Ali Rahman, semasa hidupnya senantiasa memberikan nafkah, dedikasi, kasih sayang, dan nasehat agar saya menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara terutama dalam keluarga. Penulis juga tiada henti-hentinya mendoakan semoga almarhum ayah memperoleh tempat yang mulia di sisi-Nya, diterima amal ibadahnya, dipalangkan kuburnya, diampunkan segala dosanya, dan dimasukkan ke dalam Syurga Jannatunnaim. Semoga pengobanan keduanya Allah lipat gandakan pahala dan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang tiada tara baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin ya rabbal alamin.

8. Saudara-saudaraku kakanda Harianto Arbi, Ayunda Hidayati, Ayunda Roma Antri Yunesti, adinda Riki Hartomi, adinda Farsi Antoni, adinda Alm. Anis Ariadi, adinda Muslika Alfadi, adinda Lifah Mudha. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai bagi penulis yang selama ini mereka semua sangat berarti dalam hidup saya yang tak pernah letih memberikan semangat untuk saya dan tanpa mereka saya tidak berarti apa-apa.
9. Adik-adikku Widi Isman, S.E, Kusmayadi Era, S.H, Asmiardi, S.E, Yumsami Pramata, S.AP, Nelti Rianfika, S.H, Meldi Harisman, Erdi Asim, Cut Sri Hartama, Puput Satria Fangi, Afrida Ningsi, Nini Asmili, Jon afriadi, yang selalu membantu dalam segala hal, baik moril maupun materiil kepada penulis yang tiada ternilai harganya dan tidak bisa tergantikan oleh penulis.
10. Para keluarga dekatku yang selalu membantu baik moril maupun materiil, serta tidak pernah berputus asa menasehatiku. Semoga kebaikan yang selalu

kalian curahkan pada saya senantiasa Allah SWT balas dengan kebaikan pula dan diberikan kebahagiaan dunia maupun kelak akhirat.

11. Seluruh teman-teman dan sahabat karibku: Mbak Trisna Wulan Arisanti, S.H, Mohammad Hadidi, S.Sy., M.H, Zul Aslan, S.Sos, Sadak Hada Samami, S.Pd, Ibrahim Hamza, S.P, Jul Ahmad Amin, Yayan Saputra, Dona Kurniawan, Ali Rahmin, yang senantiasa menolong serta membantu selama penulis berada di Kota Malang. Terimakasih atas segala kebaikan dan kebersamaan kalian semua semoga dibalas oleh Allah SWT, dan harapannya senantiasa terjalin silaturahmi diantara kita. Aamiin.

Akhirul kalam penulis panjatkan do'a kehadiran Ilahi Rabbi agar semua yang telah berjasa kepada penulis dilimpahkan pahala dan karunia yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi penulis dan menjadi catatan amal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bermanfaat bagi yang membaca dan mempergunakannya. Aamiin ya Rabbal alamin.

***Billahitaufig Walhidayah,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Malang, 26 Juli 2018  
Penulis,

**IRMAYADI SASTRA**

## HALAMAN MOTTO DAN PESEMBAHAN

### MOTTO:

“Wa man jaahada fa innama yujahidu linafishi”

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah  
untuk dirinya sendiri  
(QS. Al-Ankabut. 29:6)

“In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa laha”

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan  
jikalau kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.  
(QS. Al-Isra. 17: 7)

“Jangan pernah lupakan orang yang telah berjasa dalam hidup mu.  
Karena sukses mu itu adalah bagian dari pencapaian mereka”  
~”Irmayadi Sastra”~

“Tidak ada alasan bagi seseorang untuk merantau ke negeri orang,  
melainkan untuk memperbaiki diri dan kehidupannya kelak”  
~”Irmayadi Sastra”~

“Sepenggal Do'a jauh lebih berharga dari segalanya.  
Karena di dalam nya, tersirat kedahsyatan yang luarbiasa.  
Dan segalanya dilakukan pasti membutuhkan Do'a”  
~”Irmayadi Sastra”~

“Twijfel is de vader der wetenschap”  
Keragua-raguan adalah bapak dari ilmu pengetahuan

### PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan khusus kepada:  
Ibu ku Darni dan Alm. Ayah ku,  
Kakak ku: Roma Antri Yunesti, dan adik-adik ku: Riki Hartomi,  
Farsi Antoni, Alm. Anis Aryadi, Muslika Alfadi,  
dan adik bungsu ku adinda Mudha Lifa



## ABSTRAK

**Irmayadi Sastra:** *Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif Melalui Tahapan Uji Kompetensi (Fit And Proper Test) Dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif.*

Untuk mengentaskan problematika dalam pencalonan anggota legislatif maka perlu *rebranding* atau *redesain* terhadap pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, dan kemudian sistem perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum anggota legislatif yakni UU No. 8 Tahun 2012 harus di rekonstruksi atau direvisi ulang guna menata konstelasi pencalonan anggota legislatif kepada pemilihan yang demokratis sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah untuk mencari benang merah dalam rangka memperbaiki proses dan mekanisme pencalonan anggota legislatif. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, dibutuhkan rekonseptualisasi sebagai jalan tengah mencari titik terang guna memperbaiki sistem pencalonan anggota legislatif, agar selama proses rekrutmen sejak awal sampai akhir harus melibatkan keikutsertaan dan transparansi publik sehingga kepercayaan itu dapat dibangun di masyarakat. Dalam rangka menciptakan sistem demokrasi yang berkualitas maka yang perlu ditransformasi adalah sistem pencalonan anggota legislatif. Jadi pelaksanaan pencalonannya diselenggarakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Artinya untuk mencari sosok pemimpin yang berkualitas dan mempunyai integritas tinggi itu memang dibutuhkan sebuah mekanisme yang matang dan proses yang panjang, sehingga pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat betul-betul memiliki jiwa kesatria, tangguh, cerdas, amanah dan terlebih memahami sistem ketatanegaraan.

Oleh karena itu, setiap proses pencalonan anggota legislatif, para calon harus melewati beberapa tahapan seleksi yang meliputi: penilaian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kompetensi (*fit and proper test*) yang terdiri atas pembuatan makalah, pemaparan makalah, test wawancara, tes psikologi, dan penentuan urutan calon, serta mengumumkan hasil penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi yang dimaksud adalah panitia yang dibentuk berdasarkan perpres atau peraturan DPR yang tertuang dalam Tata Tertip Pencalonan Anggota Legislatif. Tidak hanya itu, dalam proses pencalonan yang diselenggarakan oleh panitia seleksi harus melibatkan partisipasi publik guna mengantisipasi ketidakpercayaan dan kontroversi di masyarakat. Apabila semua proses itu diaplikasikan dalam pelaksanaan pencalonan anggota legislatif maka tidak menutup kemungkinan akan membuka pintu gerbang perbaikan pada sistem demokrasi yang ideal dan melahirkan pemimpin bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Demokrasi adalah sebagai salah satu manifestasi pemilihan wakil-wakil rakyat secara sah menurut konstitusi, dengan demikian jika demokrasi ini tidak berjalan dengan baik maka demokrasi tersebut akan mengalami degradasi dan akan mendekati pada ambang kerusakan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, demokrasi harus dirawat dengan baik guna menjaga marwah dan mempertahankan martabat suatu bangsa.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Fit and proper test, Kapabilitas anggota legislatif.

## ABSTRACT

**Irmayadi Sastra:** *Reconstruction of Legislative Member Nominations Through the Stage of Competency Test (Fit And Proper Test) in the Framework of Building the Capability of Legislative Members.*

To alleviate the problems in the nomination of legislative members it is necessary to rebranding or redesigning the pattern of political recruitment carried out by political parties, and then the system of legislation governing legislative elections namely Law No. 8 of 2012 must be reconstructed or revised in order to organize the constellation of nomination of legislative members to democratic elections in accordance with the ideals of Pancasila and the 1945 Constitution. Efforts should be made to find a common thread in order to improve the process and mechanism for nominating legislators. In order to realize this, reconceptualization is needed as a way of seeking a light to improve the nomination system of legislative members, so that during the recruitment process from the beginning to the end it must involve public participation and transparency so that trust can be established in the community. In order to create a quality democratic system, what needs to be transformed is a system of nominating legislative members. So the implementation of his candidacy is held transparently, participatively, objectively, and accountably. This means that in order to find a leader who has high quality and high integrity, a mature mechanism is needed and a long process, so that leaders who are desired by the people really have a knight soul, are strong, smart, trustworthy and especially understand the constitutional system.

Therefore, every process of nominating legislative members, candidates who have to go through several stages include: administrative statistics, delivery of vision and mission, competency test (fit and proper test) which contains the making of papers, presentation of papers, interview tests, psychological tests, and determine the sequence, and announce the results made by the cell committee. The appointed ruler is the committee formed by the presidential regulation or parliamentary regulation which is contained in the Rules of Procedure for Nominating Legislative Members. Not only that, in the nomination process carried out by the committee must have parts that can be utilized by the community. The time used in the legislative nomination is not possible to open the door to an ideal democratic system and give birth to a quality and integrity. Democracy is one manifestation of the election of people's representatives in accordance with the constitution, thus if this democracy does not go well then democracy will be degraded and will affect the life system of the nation and state. Therefore, democracy must be used well in order to maintain the dignity and maintain the dignity of the nation.

**Keywords:** Reconstruction, Fit and proper test, Capability of legislative members.

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul**

**Halaman Persetujuan Pembimbing**

**Halaman Persetujuan Penguji**

**Halaman Pernyataan**

**Kata Pengantar ..... i**

**Halaman Motto dan Persembahan ..... v**

**Abstrak ..... vi**

**Abtrac ..... vii**

**Daftar Isi ..... viii**

**PENDAHULUAN ..... 1**

1. Latar Belakang Masalah ..... 1

2. Rumusan Masalah ..... 5

**KAJIAN PUSTAKA ..... 6**

1. Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif ..... 6

a. Defenisi Rekontruksi ..... 6

b. Pengaturan Rekrutmen Anggota Legislatif..... 7

2. Konsep *Fit and Proper Test* Calon Anggota Legislatif..... 9

3. Tinjauan Yuridis terhadap Pemilihan Anggota Legislatif ..... 10

4. Demokrasi Pemilihan Anggota Legislatif dan Peran Partai Politik.....10

a. Teori Demokrasi dan Perinsip Demokrasi ..... 10

b. Teori Kepartaian dan Rekrutmen Anggota Legislatif ..... 12

**METODE PENELITIAN ..... 16**

1. Jenis Penelitian ..... 16

2. Pendekatan Penelitian ..... 17

3. Sifat Penelitian ..... 17

4. Sumber dan Bahan Hukum ..... 18

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 19

6. Teknik Analisa Hukum ..... 20

<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
1. Konstruksi <i>fit and proper test</i> terhadap proses pencalonan anggota Legislatif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif .....	21
2. Rekonstruksi Sistem Kepartaian dan Pembaharuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif oleh DPR .....	23
3. Konstruksi ideal proses pencalonan anggota legislatif dalam rangka memperbaiki kapabilitas anggotas legislatif di masyarakat .....	26
4. <i>Fit And Proper Test</i> Dalam Pencalonan Anggota Legislatif .....	28
a. Regulasi yang mengatur <i>fit and proper test</i> .....	29
b. Tim penyeleksian calon anggota legislatif.....	30
5. Komparasi Pengangkatan Pejabat Negara dilingkungan Institusi Yudikatif.....	31
6. Koalisi partai politik permanen secaca vertikal-horizontal dari Pusat sampai ke Daerah .....	33
<b>PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
1. Kesimpulan .....	34
2. Rekomendasi .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pencalonan Anggota Legislatif di Indonesia pada umumnya dilakukan oleh partai politik yang telah sah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Republik Indonesia sebagai partai peserta pemilihan umum. Pencalonan anggota legislatif dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dan diusung melalui partai politik. Pemilihan legislatif dilaksanakan sebagai salah satu wujud bahwa Negara Indonesia menganut asas demokrasi dan sesuai dengan amanat Konstitusi (UUD 1945) untuk dilaksanakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun Daerah.

Dalam pencalonan anggota legislatif, partai politik mempunyai pranan yang sangat fundamental untuk mempersiapkan dan membentuk keperibadian setiap calon yang bakal menjadi pemimpin bangsa, yang bisa membawa perubahan terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pastinya para calon yang diusung harus memiliki modal pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan global. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yakni perekrutan terhadap orang-orang yang mempunyai bakat dan kualitas, kemudian dijadikan sebagai anggota partai dan aktif menjalankan totalitas perjuangan partai politik. Rekrutmen diyakini sebagai salah satu instrumen untuk memilih serta menyeleksi calon-calon yang memiliki bakat dan kemampuan untuk dipersiapkan sebagai calon anggota legislatif.

Mekanisme pencalonan anggota legislatif tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan baik dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilihan umum legislatif. Padahal mekanisme itu sangat penting dilakukan sebagai sebuah prosedur utama untuk menguji dan menyeleksi para calon kandidat yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik<sup>1</sup> dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,<sup>2</sup> tidak ditemukan bagaimana prosedur atau mekanisme proses pencalonan anggota legislatif. Dari ke dua undang-undang ini, secara substansial tidak mengatur prosedur dan mekanisme pencalonan, di dalamnya hanya mengatur tentang persyaratan calon anggota anggota legislatif.

Dalam pemilihan calon anggota legislatif, tidak ada proses *check and balances* antara institusi partai dan legislatif baik pusat maupun daerah. Tidak seperti pemilihan pejabat negara lainnya, dimana ada keterlibatan MA, Presiden, maupun DPR. Mislanya, proses pemilihan Anggota BPK selama ini murni dilakukan oleh DPR, karena DPR lah yang melakukan uji kompetensi atau *fit and proper test* terhadap calon anggota BPK. Pada dasarnya keterlibatan semua unsur itu perlu dalam pencalonan anggota legislatif dan yang paling penting keterlibatan anggota masyarakat untuk menilai serta menentukan wakilnya dalam pemilihan umum.

Faktanya, Lembaga Legislatif adalah lembaga kekuasaan negara yang termasuk dalam *trias politica*. Namun sangat disayangkan lembaga itu di isi oleh orang-orang yang berkualitas dan berintegritas rendah, notabenenya tidak memahami substansi dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Akhirnya setiap kewenangan yang di buat dapat mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka dicalonkan berdasarkan alasan-alasan politis praktis tanpa mempertimbangkan kompetensi, integritas, kapabilitas, visi dan misi dari masing-masing calon. Terkadang partai politik lebih mendominasi orang-orang borjuis (pemodal),

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, TLN 4801

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TLN Nomor 5316.

popularitas seorang calon tanpa harus mengetahui latar belakang dan pendidikannya. Ada dua kelemahan yang terjadi pada tubuh legislatif ketika terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

*Pertama*, kelemahan pada anggota. Adapun kelemahan pada anggota adalah sebagian dari anggota tidak memahami substansi perundang-undangan, pembuatan produk undang-undang sering tidak mendasar dan tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan, diantara mereka banyak melakukan kasus korupsi misalnya pada tahun 2014 ada sebanyak 3.600 orang anggota dewan,<sup>3</sup> anggota legislatif pusat dan daerah menduduki peringkat ke tiga kasus korupsi yakni 129 kasus dan kasus, kemudian kasus Ketua DPR yang juga sebagai ketua umum partai golkar yakni Setya Novanto, melakukan kasus korupsi e-ktip senilai Rp. 2,3 triliun,<sup>4</sup> dan penyelewengan kewenangan lainnya.

Selain kasus korupsi diatas, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Sarmuji mengatakan, parlemen lebih sibuk mengurus kebutuhan sendiri daripada memikirkan rakyat. seharusnya DPR melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti menggali aspirasi rakyat.<sup>5</sup> Artinya legislatif tidak konsisten mengurus kepentingan rakyat, DPR bekerja untuk pribadi, kelompok dan partai politik.

*Kedua*, kelemahan pada Lembaga DPR. Kelahaman lembaga yang terhormat itu adalah ketika DPR tidak bisa merevisi isi dari Perppu yang telah diajukan oleh pemerintah. Anggota Komisi XI Johny G. Plate menyampaikan keluhannya, masalahnya DPR tidak dapat melakukan revisi terkait aturan yang tertuang dalam setiap Perppu apabila isinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ihsanuddi, 2014. *KPK: Anggota DPR yang terjerat Korupsi 3.600 orang*, di kutip dari <http://nasional.kompas.com>, pada tanggal 28 maret 2018

<sup>4</sup> Okezone News, 2017. *Statistik: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Swasta, disusul Pejabat dan Anggota DPR*, di kutip dari <http://news.okezone.com>, pada tanggal 28 maret 2018.

<sup>5</sup> Wiki DPR, 2014. *Harian pkomas, DPR Jangan Abaikan Rakyat*, di kutip dari <http://wikidpr.org/news/harian-kompas>, pada tanggal 28 maret 2018.

<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2017. Perppu No. 1 Tahun 2017 Miliki Kelemahan, dikutip <http://dpr.go.id/>, diakses pada tanggal 24 April 2018

Kesalahan paling fatal parpol adalah meloloskan calon yang pernah tersandung kasus korupsi. Padahal telah jelas di dalam UU Pemilu Legislatif bahwa mereka yang telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih tidak boleh menjadi calon. Lolos nya calon yang pernah tersandung korupsi menandakan ketidakseriusan dalam seleksi pencalonan anggota legislatif. Parpol juga terlihat enggan meneulursuri ke masyarakat tentang rekam jejak calon. Misalnya parpol bekerjasama dengan masyarakat, LSM, OKP, dan organisasi pemudaan. Kerjasama dilakukan parpol untuk menulursuri sejauh mana kapabilitas calon yang akan diusung di pemilu.

Dengan proses seleksi yang buruk, bagaimana mungkin kita akan menemukan calon anggota legislatif yang berkualitas. Publik akan meragukan kredibilitas calon hasil seleski parpol apabila tidak secara terbuka dalam proses pencalonannya. Mestinya dalam proses pencalonan ada mekanisme *fit and proper test* yang dilakukan parpol. Layaknya DPR yang diberi kewenangan oleh konstitusi UUD 1945 pasca-amandemen, tidak hanya menjalankan fungsi pokok parlemen seperti legisilasi, pengawasan dan anggaran, DPR juga diberikan kewenangan yang luas dalam pemilihan pejabat negara, dan berbagai jabatan strategis lainnya. Pengisian jabatan publik, misal pimpinan KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, anggota Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi, serta komisi negara lainnya dilakukan oleh DPR. tidak hanya itu, DPR juga mempunyai andil dalam pemilihan hakim agung, Gubernur Bank Indonesia, Anggota BPK, Kepala Kepolisian Indonesia dan Panglima TNI. Semua peneyelesian pejabat negara dilakukan dengan uji kompetensi atau *fit and proper test*.



Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan pentingnya transformasi dalam hal pencalonan anggota legislatif. Transformasi yang dimaksudkan adalah pemberlakuan uji kompetensi (*test and proper test*) yang dilakukan partai politik terhadap pencalonan anggota legislatif guna menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Diharapkan dengan implementasi mekanisme uji kompetensi (*fit and proper test*) dapat memperbaiki tata cara pencalonan yang selama ini yang kurang efektif. Uji kompetensi bertujuan untuk melihat, menelaah bagaimana kesiapan dan kesanggupan masing-masing calon, dengan adanya uji kompetensi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berwibawa. Keutamaannya dilakukan uji kompetensi terhadap calon yakni agar masyarakat dapat mengetahui latar belakang, kemampuan, track record, rekam jejak, visi-misi dari masing-masing calon yang bakal menjadi perwakilannya di parlemen.

Terkait kasus diatas yang telah penulis kemukakan, maka kajian ini fokus terhadap pentingnya sebuah regulasi baru atau sistem yang mengatur tentang uji kompetensi atau *fit and proper test* terhadap pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian penulis menentukan judul dalam hal ini adalah “Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif Melalui Tahapan Uji Kompetensi (*fit and proper test*) dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif.”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konstruksi uji kompetensi (*fit and proper test*) terhadap proses pencalonan anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

- b. Bagaimanakah konstruksi ideal terhadap proses pencalonan anggota legislatif dalam rangka memperbaiki kapabilitas anggota legislatif di masyarakat?

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif

#### a. Defenisi Rekonstruksi

Secara harfiah rekonstruksi berasal dari kata *reconstruct*. *Reconstruct* memiliki akhiran *ion* di gabung menjadi *reconstruction* merupakan sebuah kata benda yang memiliki makna membangun atau pembangunan kembali.<sup>7</sup> Sementara dalam pandangan yang lain makna rekonstruksi secara sederhana diinterpretasikan oleh B.N Marbun ialah penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau seperti semula.<sup>8</sup> Sedangkan menurut M. Syamsudin bahwa rekonstruksi itu didefinisikan proses membangun ulang atau menciptakan ulang atau melakukan pengorganisasian ulang terhadap sesuatu.<sup>9</sup>

Rekonstruksi secara umum mengandung arti memperbaharui atau menata ulang sebuah sistem. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional lazim di kenal dengan sebutan *rekonstruksi*, maka istilah *rekonstruksi* sangat berkaitan erat dengan kata memperbaharui kembali atau menata ulang sebuah sistem ketata-negaraan. Jadi, kedua istilah itu sangat erat kaitannya dengan *law reform* dan *law development*.

Ditinjau dari segi sistem hukum (*legal system*) yang terdiri atas *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum tata

---

<sup>7</sup> Di kutip dari Tesis Moh. Kamaludin. 2017. *Rekonstruksi Pengaturan Tentang Pelacuran Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 16

<sup>8</sup> M.N. Marbun, 1996. *Kamus politik*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. Hal: 469

<sup>9</sup> M. Syamsudin. 2011. *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011. Hal 13

negara (*constitutional legal reform*) mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Pembaharuan substansi hukum tata negara (UU Pemilu Legislatif dan UU Parpol), serta pelaksanaan prekrutan, pencalonan sampai kepada tahap pengajuan calon legislatif ke pemilihan umum.
- b. Pembaharuan struktur hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang mencakup atas pembaharuan atau penataan lembaga/institusi, mekanisme dan sistem manajemen/tata laksana serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum tata negara atau hukum administrasi negara, dan
- c. Pembaharuan budaya hukum tata negara, yang meliputi aspek kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum tata negara.

Dengan demikian rekonstruksi yang dimaksudkan adalah untuk membangun kembali sebuah sistem hukum tata negara, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, tujuannya semata-mata untuk memperbaiki atau mendesain kembali sebuah sistem yang tidak sesuai lagi dengan zaman milenial sekarang ini. Dengan adanya rekonstruksi, rekrutmen, pencalonan dan pengajuan bakal calon legislatif dapat di ketahui benang merah atau temuan hukum (*rechpending*) yang baik dalam manajemen mekanisme pencalonan anggota legislatif.

#### **b. Pengaturan Rekrutmen Anggota Legislatif**

Mekanisme penerimaan calon anggota legislatif telah tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah

---

<sup>10</sup> Moh. Kamaludin...*Loc. Cit.*

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang persyaratan calon anggota legislative, namun rekrutmen dan penerimaan calon masing-masing dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan Ad/Art setiap partai politik.

Masing-masing partai politik mempunyai pola rekrutmen dan standar penerimaan calon legislative yang berbeda-beda. Pola rekrutmen calon anggota partai sesuai dengan regulasi yang dipercayainya. Selain merekrut, partai politik juga mengembangkan sistem edukasi dan kaderisasi terhadap calon legislatifnya. Mengingat rekrutmen menjadi sebuah persoalan yang *urgent* sebagai implementasi nilai-nilai partai politik yang wajib diajarkan kepada seluruh calon untuk mengetahui baik sejarah, visi/misi, taktik dan strategi partai politik, juga hal-hal yang berkenaan dengan kemajuan bangsa dan Negara, sebab salah satu tujuan dibentuknya partai politik adalah ikut mempertahankan, memajukan, dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem perkaderan juga dikenal dengan transfer pengetahuan, keterampilan, dan kealihan dalam berpolitik. Tugas utama dan tanggungjawab sebuah partai politik adalah mencetak calon-calon pemimpin yang berkualitas dan berdaya saing lewat pemilihan umum.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan keseriusan partai politik, terutama ketua umum dan para petinggi partai untuk memikirkan langkah-langkah strategis yang harus di tempuh untuk mentransformasikan keadaan tersebut. Senada dengan pendapat Firmanzah, Ia menyatakan bahwa: “Mereka harus melakukan perbaikan secara totalitas terhadap sistem rekrutmen politik di dalam institusi partai yang mereka pimpin agar dapat mendukung kaderisasi nasional.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ishaq, dkk.2013.*Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Dpc Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014*, Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. III, No. 2 Oktober 2013. Hal 29

<sup>12</sup>*Ibid.*



## 2. Konsep *Fit And Proper Test* Calon Anggota Legislatif

Implementasi uji kompetensi (*fit and proper test*) merupakan sebuah konsep dasar yang dijadikan sebagai tolok ukur sebuah institusi untuk menjaring calon pejabat negara yang berkualitas, berintegritas, tidak pernah di pidana, dan tidak pula korup. Sejatinya, uji kompetensi ini bukanlah barang baru yang diterapkan di Indonesia, di institusi pemerintah sekalipun dalam hal pengangkatan pejabat mesti dilakukan *fit and proper test* terhadap calon yang akan menduduki sebuah jabatan yang strategis di sebuah lembaga negara, misalnya: di Institusi KPK, BPK, MK, Komisari HAM RI dan institusi lainnya.

Setiap pengangkatan pejabat negara yang akan menduduki sebuah jabatan strategis di institusi yang telah di sebut di atas, maka para calon wajib mengikuti *Standart Operating Procedur* (SOP), yakni menjalankan uji kompetensi atau yang di sebut *fit and proper test*. Uji kompetensi ini merupakan langkah awal untuk di ikuti oleh semua calon pejabat negara baik pejabat publik maupun pejabat administratif. Dimana setiap pengangkatan pejabat publik maka DPR yang menjadi penentu utama siapakah yang layak lolos dalam tahapan *fit and proper test* untuk menduduki sebuah jabatan strategis tersebut. Uji kompetensi dilakukan berdasarkan keputusan politik DPR, karena Legislatif mempunyai kewenangan yang di berikan oleh konstitusi (UUD 1945) yakni kewenangan *budgeting* (anggaran), *legislation* (legislasi), dan *controlling* (pengawasan). Sehingga legislatif mempunyai andil yang sangat kuat dalam penentuan pengangkatan pejabat negara di Indonesia, sebab legislatif memiliki *power* dalam mengawasi dalam setiap pengangkatan pejabat negara. Sehingga konsep uji kompetensi (*fit and proper test*) menjadi bagian dari kewenangan legislatif dalam menentukan seseorang layak atau tidak nya menjadi pejabat publik.

### **3. Tinjauan Yuridis terhadap Pemilihan Anggota Legislatif**

Sebagai sebuah Negara yang menganut azas demokrasi, Indonesia memposisikan diri menjadi sebuah Negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Pastinya, dalam menjalankan sistem Pemerintahan, Pemerintah harus tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk ketentuan yang oleh konstitusi memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih dan dipilih menjadi bagian Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum sejatinya adalah sebagai sebuah instrumen untuk memilih calon Anggota Legislatif secara sah menurut konstitusi. Pemilihan umum merupakan sebuah cara yang universal dipakai untuk mengisi keanggotaan lembaga parlemen. Di Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya di-singkat UUD 1945, semua anggota DPR, DPD, dan MPR tidak ada lagi yang diangkat. Semuanya dipilih secara langsung lewat pemilihan umum. Pemilihan umum juga dilakukan untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.<sup>13</sup> Pemilihan umum yang diaplikasikan guna mengkonstruksi relasi antara konstituen dan selanjutnya berperan merekonstruksi relasi wakil dengan rakyatnya.

### **4. Demokrasi Pemilihan Anggota Legislatif dan Peran Partai Politik**

#### **1. Teori Demokrasi dan Perinsip Demokrasi**

##### **a. Teori Demokrasi**

Untuk memahami makna demokrasi, dapat ditelusuri dari dua tinjauan, yakni tinjauan kebahasaan (*etotimologis*) dan tinjauan secara istilah (*terminologis*). Secara etimologi “*democracy*” terdiri atas dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang bermakna rakyat, dan “*cratein*”

---

<sup>13</sup>Abdul Rokhim. 2011. *Pemilihan Umum Dengan Model “Parliamentary Threshold” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7. No. 14. Hal 85.

atau “*cratos*” yang bermakna kedaulatan atau kekuasaan. Jadi secara kebahasaan *demos cratein* atau *demos cratos* (demokrasi) ialah bentuk negara dimana pada sistem pemerintahannya, rakyat yang memegang kendali kedaulatan, kekuasaan, dan memegang keputusan tertinggi dalam menentukan pemerintahannya.<sup>14</sup>

Sementara dalam istilah yang lain, pengertian demokrasi menurut para ahli ialah:<sup>15</sup>

1. Joseph A. Schemeter mengemukakan bahwa demokrasi ialah sebuah perencanaan lembaga untuk mendapatkan keputusan politik yang dilakukan sekelompok orang atau individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetisi atas suara rakyat.
2. Philippe C. Schmitter dan Terry Linn Karl, mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana pemerintah harus bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan mereka di wilayah publik kepada masyarakat, atas tindakan yang secara tidak langsung lewat kompetisi dan kerjasama antara wakil-wakil mereka yang terpilih. Sedangkan,
3. Hnedry B. Mayo mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memperlihatkan bahwa kebijakan publik ditetapkan atas dasar mayoritas wakil rakyat dan diawasi efektif dalam pemilihan berkalah dan berlandaskan prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan berpolitik.

---

<sup>14</sup> Demokrasi dijelaskan oleh Rowland B.F. dalam bab 6 tentang Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, dalam buku yang berjudul: Struktur Politik, Sistem Pemerintahan, dan Demokrasi Struktur Politik. Rowland menjelaskan demokrasi secara bahasa bahwa demokrasi adalah suatu bentuk negara yang dimana rakyatlah yang berkuasa terhadap jalannya pemerintahan. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni “*demos-cratein*” atau *demos cratos*” yang berarti demokrasi. Hal 143

<sup>15</sup> Rowland. *Loc. Cit.*

Makna demokrasi dalam dua dimensi, yakni pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif merupakan demokrasi yang ideal dilakukan oleh sebuah negara. Sementara demokrasi empirik demokrasi yang perwujudannya telah diaplikasikan oleh dunia politik praktis. Demokrasi empirik sebuah demokrasi yang masih relevan dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, karena norma-norma yang di implementasikan tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat.

**b. Perinsip Demokrasi**

Pemahaman tentang demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dikuasai oleh khalayak masyarakat. Meskipun pada penyelenggaraannya, saat ini mendapat peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan satu dekade (10 tahun) yang lalu. Demokrasi, selain memberikan manfaat yang positif bagi perjalanan kehidupan berbangsa, juga memberikan dampak yang negatif, menimbulkan perpecahan antar kelompok, karena perbedaan visi dan misi sehingga perpecahan sering terjadi seperti saat sekarang ini. Bahkan konflik yang terjadi di Indonesia terjadi akibat persaingan antar pihak-pihak yang memiliki kebebasan mengemukakan pendapat yang merasa hak nya di bela oleh konstitusi. Hal ini diakibatkan pihak-pihak yang bersengketa namun tidak menguasai konsep, nilai-nilai, atau prinsip demokrasi yang sebenarnya. Akibatnya, perpecahan diantara masyarakat dapat merugikan dan mengkhianati prinsip demokrasi yang telah diimplementasikan selama ini serta masyarakat yang tidak terlibat dalam urusan tersebut ikut menjadi korban politik.

Demokrasi telah dicetuskan menjadi salah satu sistem politik yang diyakini dapat meningkatkan kemakmuran rakyat yang lebih baik. Secara ideal praktik demokrasi di kenal diberbagai negara dan dijalankan sebagai

perimadona yang diyakininya dapat merubah nasib rakyat, tetapi peratik demokrasi masih dibaluti bermacam persoalan yang tidak kunjung usai, sehingga pada penerapannya makna demokrasi hanya dijadikan sebagai instrumen semata-mata untuk mencapai kekuasaan, tanpa banyak memberikan kontribusi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup> Untuk mencapai dinamika demokrasi yang baik perlu adanya pembaharuan perilaku elite politik dan pembaharuan sistem politik sehingga demokrasi yang akan dijalankan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

## **2. Teori Kepartaian dan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif**

### **a. Konsep/Pengertian Partai Politik**

Partai Politik adalah merupakan sebuah sistem kelembagaan yang besumber dari ekspresi, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, ide-ide berilian yang dieksplorasi secara bebas dalam negara demokrasi. Secara pengertian partai politik mengandung makna yakni sebuah organisasi bersifat nasional dan diprakarsai oleh sekumpulan warga negara secara suka rela atas dasar persamaan visi/misi cita-cita untuk memperjuangkan dan mengadvokasikan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara dan melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.<sup>17</sup>

Pada umumnya, beberapa ilmuwan politik biasa mendeskripsikan bahwa ada 4 fungsi partai politik. Dari empat fungsi partai politik tersebut menurut pendapat Miriam Budiardjo, sebagai sarana: a). *Political communication* (Komunikasi politik), b). *Political socialization* (Sosialisasi politik), c). *Political*

---

<sup>16</sup>Rogaiyah, 2009. *Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan atau Melahirkan Kesenjangan*. Jurnal PPKn dan Hukum, Vol. 1. No. 4. Hal 1

<sup>17</sup> Lihat penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.



*recruitment* (Rekrutmen politik), dan d). *Conflic management*(pengatur konflik).<sup>18</sup> Di sini terlihat jelas fungsi yang dijelaskan oleh pakar politik tersebut, bahwa inilah fungsi dari partai politik dalam sebuah negara demokrasi.

Walaupun demikian, ada beberapa pandangan kritis dan bahkan *skeptis* (ragu-ragu) terhadap partai politik. Yang paling mendasar dinyatakan bahwa partai politik itu pada dasarnya tidak lebih hanya dijadikan sebagai wahana atau kendaraan politik bagi sekumpulan elite yang berkuasa atau sekedar melampiaskan “nafsu birahi” untuk berkuasa sendiri. Partai politik hanya berfungsi sebagai instrumen bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung dan berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dihipnotis atau mudah dikelabui, demi memaksakan berlakukunya keputusan-keputusan publik tertentu “*at the expense of the general will*” atau kepentingan umum.<sup>19</sup>

Sistem kepartaian yang sehat sangat menentukan bekerjanya sebuah sistem ketatanegaraan berlandaskan “*check and balances*” dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif atau tidaknya kerja fungsi institusi negara sangat tergantung pada prinsip “*check and balances*” dan berdasarkan konstitusi sangat menentukan kualitas partai politik dan sistem demokrasi yang dikembangkan di sebuah negara. Semua ini tentu tidak terlepas dari pertumbuhan dinamika pemikiran, tradisi, dan alur berpikir masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan berpikir itu pada prinsipnya akan mempengaruhi tumbuh-kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berkumpul dan berserikan mengemukakan pendapat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

#### **b. Rekrutmen Calon Kandidat Anggota Legislatif**

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, 1992. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal 163

<sup>19</sup> Disampaikan oleh Jimly Assidqqi, dalam makalah yang berjudul: Dinamika Politik dan Demokrasi

Ahmad dan Powell dalam teorinya memaparkan bahwa prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi atas bagian yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Rekrutmen Tertutup (*close recruitment*) ialah rekrutmen yang dilaksanakan oleh petinggi partai yang memilih kekuasaan untuk memilih siapa saja kandidat yang dianggap pantas diberikan jabatan sesuai skill dan kemampuan yang dimilikinya untuk memimpin. Prosedur ini disebut prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh orang-orang tertentu saja.
- 2) Rekrutmen terbuka (*open recruitment*) adalah setiap individu berhak memilih siapa saja yang akan menjadi calon pemimpin di dalam negaranya serta berhak mengetahui hasil pengumuman siapa saja yang menang dalam kompetisi tersebut yang diselenggarakan secara bebas, dan terbuka. Yang dikenal dengan istilah “luber” yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta dikenal istilah “jurdil” yakni jujur dan adil.

Pola rekrutmen politik mempunyai keragaman meskipun ada dua metode seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan yang dianggap sangat penting. Tetapi disamping itu ada berbagai cara dalam rekrutmen politik yang dilakukan yakni “Penarikan undian, Rotasi, Perebutan kekuasaan, *Patronage* dan *Co-option*.”<sup>21</sup> Tiap partai dalam menentukan calon anggota legislatifnya menggunakan berbagai metode yang diyakininya paling baik dan sesuai dengan ideologi partai yang dianutnya.

Pola-pola rekrutmen yang diterapkan oleh tiap-tiap partai politik itu pada dasarnya belum memberikan keterbukaan dan transparansi terhadap rakyat, karena dalam proses pencalonan anggota legislatif yang diusung oleh partai

---

<sup>20</sup> Rhanty Syefira Salsabila. 2016. *Pola Rekrutmen Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru Tahun 2014*. JOM Fisip. Vol. 3. No. 2. Hal 4

<sup>21</sup> Fanindita, Fania. Tanpa Tahun. *Rekrutmen Politik terhadap Perempuan Dalam Partai Politik dan Parlemen*. Medan. Hal 22

politik terkait tidak melibatkan partisipasi masyarakat sehingga para calon tidak dapat dikenal dan diketahui bagaimanakah latar belakang, rekam jejaknya bahkan kualitas, integritas, dan pendidikan diri dari masing-masing calon anggota legislatif.

Dengan demikian, penulis menganggap pola-pola yang telah lama diperaktekkan oleh berbagai partai politi tersebut masih mengalami kelemahan-kelemahan karena dalam pelaksanaan rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif tidak di dahuli dengan ujian kompetensi "*fit and proper test*" dan tidak melibtakan masyarakat dalam pemilihan calon-calon yang diusung oleh partai politik tersebut. Sehingga penulis mencoba memberikan solusi terbaik dalam proses pencalonan anggota legislatif dengan pendekatan penerapan uji kompetensi terhadap masing-masing calon agar para calon dapat menjadi generasi yang mengenyampingkan kepentingan pribadi dan lebih berjuang untuk rakyat serta jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, Ia mengemukakan bahwa,dalam jenis penelitian hukum itu terdiri atas dua komponen yakni "penelitian hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni "*penelitian normatif*" dan penelitian yang berdasarkan langsung pada pengalaman-pengalaman di lapangan yakni "*penelitian empiris.*" Yang dikatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf korelasi hukum, histori hukum (*law history*), serta penelitian tentang komparasi atau perbandingan hukum. Sementara, penelitian lapangan "*empiris*" adalah penelitian yang berkaitan dengan identifikasi hukum dan efektifitas hukum, dimana hukum pada

hakikatnya diciptakan dan diimplementasikan oleh manusia yang hidup dalam dinamika masyarakat, bahwasanya kehadiran hukum tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat dan *behavior* (tingkah laku) manusia, karena perbuatan manusia erat kaitannya dengan institusi hukum.<sup>22</sup>

Adapun, dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa jenis penelitian, yang terdiri atas penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini merujuk pada “penelitian kepustakaan” guna menentukan serangkaian norma atau aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrinisasi hukum untuk menjawab berbagai issue hukum yang akan dihadapi. Dalam tesis ini, bahwa penelitian yuridis normatif hukum karena merupakan sebuah objek yang sangat signifikan untuk dikaji, sehingga dalam penelitian ini akan bertumpuh pada teori dan fakta yang ada dan dalam penelitian ini tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, *conceptual approach*, *statute approach* atau pendekatan-pendekatan konseptual yaitu pendekatan secara konsep atas suatu permasalahan yang belum ada aturan hukum.<sup>23</sup> Metode penulisan pada tesis ini adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bagian sebuah sistem norma, sehingga dalam penelitian ini juga dapat menggunakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan sebagai penguat alasan dan data penulis.

## **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, adalah penelitian hukum terdiri atas beberapa pendekatan, yakni pendekatan khusus (*case*

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamad. 2010. “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Belajar: Yogyakarta. hal 153.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Medai Grup. Hal 9

*aapproach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Eksplanasi. Maksudnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali sebuah teori atau hipotesa guna memperkuat argumentasi atau bahkan menolak teori atau hipotesa yang merupakan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian, penelitian eksploratori adalah penelitian yang bersifat fundamental dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi-informasi, serta data-data mengenai hal-hal yang belum diketahui oleh penulis.<sup>25</sup> Sifat penelitian ini akan menguji suatu teori yang berhubungan pada pencalonan anggota legislatif yang diselenggarakan oleh partai politik untuk diperbaharui (*recontruction*) demi memperbaiki sistem demokrasi pemilihan anggota legislatif yang baik dan ideal.

#### **4. Sumber dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian tesis ini, penulis berpatokan pada data sekunder. Adapun data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber aslinya, didapatkan dari bahan-bahan atau yang bersumber pada kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki, berpendapat bahwa, “data sekunder merupakan data yang mencakup atas bahan hukum primer, hukum skunder itu sendiri, dan bahan non hukum”.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yang mengandung arti memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, naskah-naskah resmi, dan risalah didalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta keputusan yang telah memiliki hukum tetap yang diputuskan oleh hakim lewat pengadilan.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hal 133

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 12

## 2. Bahan Hukum Skunder

Meliputi bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan menunjang atas bahan hukum primer, kegunaannya adalah untuk membantu penulis dalam menganalisis serta mengetahui bahan umum primer yang terdiri atas: literatur yang berupa hasil penulisan yang berasal dari hasil penelitian, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, berita, makalah-makalah, seminar, dan naskah-naskah publikasi yang memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Internet serta tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan rekonstruksi pencalonan anggota legislatif melalui *“fit and proper test”* dalam rangka membangun kapabilitas anggota legislatif, serta memperbaharui sistem rekrutmen politik beserta peraturan perundang-undangan nya.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam proposal tesis ini penulis menggunakan data primer, skunder dan tersier. Pengumpulan data akan dijadikan dasar sebagai landasan untuk mengkaji, menelaah, mengelolah data secara sistematis. Dengan merujuk pada bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi guna mendapatkan teori-teori yang menyangkut tentang kekuasaan lembaga negara. Data tersebut disusun secara mendalam dan sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang mendekati kebenaran dan kelengkapan teori dari klasifikasi yang dilakukan secara kualitatif.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dalam proposal penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

---

<sup>26</sup> Lexi Moeloeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya. Hal 2



- a. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keseimbangan kekuasaan lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dikaji secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai lembaga negara.
- b. Penelitian pustaka (*Library research*), yaitu untuk mengumpulkan data-data untuk dipelajari secara mendalam dan dikaji serta dianalisis bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku, jurnal hukum, majalah, koran, beritan online, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang berfokus pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan landasan teori mengenai kajian dan analisa dari perspektif hukum tata negara di Indonesia.

## **6. Teknik analisa bahan hukum**

Tekni analisis data yang akan digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif, yakni data yang didapatkan dari studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan penjelasan terhadap masalah yang akan dibahas.<sup>27</sup> Tujuan digunakan analisis kualitatif tersebut bertujuan untuk memperoleh pandangan-pandangan terkait rekonstruksi pencalonan anggota legislatif melalui "*fit and proper test*" dalam rangka membenagun kapabilitas anggota legislatif.

Analisa data akan dilakukan oleh peneliti terhadap bahan-bahan yang telah terkumpul. Analisa data adalah bagian dari proses menyederhanakan kajian terhadap obyek yang akan diteliti oleh penulis guna mengevaluasi, menguraikan dan menelaskan tentang tujuan penelitian yang dilakukan agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penelitian ini berlandaskan pada analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif-

---

<sup>27</sup> Z. Efendei, 2012. Proposal Tesis S2 Undip, <http://eprints.undip.ac.id>. Hal 33

induktif. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab tantangan serta permasalahan yang terjadi terhadap peran dan fungsi legislatif di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi *fit and proper test* terhadap proses pencalonan anggota Legislatif berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif**

Uji kompetensi "*fit and proper test*" merupakan instrumen penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap proses pengangkatan pejabat negara. Setiap proses pencalonan pejabat negara di suatu institusi pastinya mempunyai regulasi atau dasar hukum yang dikeluarkan oleh institusi terkait. Beda halnya, contoh dalam pencalonan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) proses pencalonan nya mempunyai mekanisme yang sangat ketat, mulai dari pemilihan calon yang di usung oleh partai politik yang berkoalisi, bahkan pencalonannya melibatkan anggota masyarakat dalam memilih calon yang layak dan berkualitas. Tidak hanya itu, pencalonan kepala daerah turut diberlakukan sebuah penilaian yang bijak melalui "*test and propert test*" yang wajib diikuti oleh setiap calon yang maju sebagai calon kepala daerah, hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Pasal 38. Sementara, pada lembaga yang lain dapat kita temukan pula, milasnya pada pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi, dasar hukumnya jelas, bahwa setiap calon hakim harus mengikuti "uji kompetensi dan kepatutan" hal ini diatur dalam Peraturan Presiden, kemudian pada Institusi BPK, KPK, Komnas HAM dan Institusi yang lain yakni setiap proses pencalonan pejabatnya harus mengikuti uji kemampuan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, jelaslah bahwa "*fit and proper test*" ini sangat penting diterapkan di seluruh isntitusi negara, tidak hanya diberlakukan pada institusi eksekutif dan yudikatif, bahkan institusi legislatif pun seharusnya mesti diberlakukan,

mengingat mekanisme uji kompetensi ini memberikan sebuah solusi terbaik dalam setiap pencalonan pejabat negara agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk terlibat dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Melihat pemaparan di atas “uji kompetensi” pada prinsip setiap lembaga negara turut diberlakukan dan diselenggarakan oleh institusi terkait dalam rangka pencalonan pejabat negara, kecuali pada lembaga legislatif. Kenapa “*fit and proper test*” tidak diberlakukan dalam setiap pencalonan anggota legislatif, sementara posisi tawar (*bargaining*) anggota legislatif sedang pengaruh terhadap keberlangsungan politik di suatu negara, kewenangan dan kebijakannya sangat mempengaruhi sistem Pemerintahan. Maju dan mundur nya sebuah pemerintahan sangat tergantung dari “*political power*” anggota legislatif, kewenangan dan kebijakan nya turut mempengaruhi dinamika perkembangan suhu demokrasi berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kualitas anggota legislatif di Indonesia, maka dalam proses pencalonannya dibutuhkan *rekonstruksi* mekanisme pencalonan anggota legislatif yang diselenggarakan oleh partai politik, terutama *rekonstruksi* terhadap Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif dan Undang-Undang Partai Politik. Sebab dengan adanya *rekonstruksi* pada sistem dan mekanisme pencalonan maka akan melahirkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun Daerah dan akan menjamin sistem demokrasi yang transparan dan berkeadilan.

Selama ini pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik hanya berdasarkan pada prosedur yang dianut oleh masing-masing partai, tetapi hasilnya tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat karena dalam proses pencalonannya, terutama masyarakat tidak mengetahui bagaimana latar belakang, pendidikan dan kemampuan calon yang di usung oleh partai tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi dibutuhkan

untuk menata kembali sistem pencalonan anggota legislatif sehingga ada suatu atauran yang sifatnya memberikan pembaharuan pada sistem rekrutmen politik yang tujuannya memperbaiki kualitas masing-masing calon yang bakal bertarung pada pemilihan umum.

Untuk mencapai pada sistem yang di cita-citakan oleh penulis, maka salah satu konsepnya adalah menata kembali proses pencalonan anggota legislatif dengan membuat *Standart Operating Prosedur* (SOP) pada rekrutmen politik. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali sistem pencalonan anggota legislatif, dengan menggunakan berbagai metode mulai dari pemilihan tingkat pertama dan pemilihan terakhir yakni pemilihan umum yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pemilihan tingkat pertama adalah pemilihan awal yang dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melewati tahapan-tahapan, dan melengkapi bebrabagi persyaratan calon serta mengikuti uji kompetensi yakni “*fit and proper test*” dan pemilihannya tersebut melibatkan partisipasi masyarakat, akdemisi, praktisi dan tokoh masyarakat. Sementara pada pemilihan kedua, dapat dilakukan apabila seorang calon dapat memenuhi kriteria dan syarat sebagai calon anggota legislatif dan telah lulus mengikuti ujian “*fit and proper test*” maka calon tersebut berhak diusungkan oleh partai politik nya menjadi calon legislatif pada pemilihan umum.

## **2. Rekonstruksi Sistem Kepartaian dan Pembaharuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif oleh DPR**

Setelah beberapa dekade, tepatnya sejak diaplikasikan kebijakan restrukturisasi pada sistem kepartaian yang dilaksanakan dengan cara fusi (konstruksi, integrasi) “paksa” oleh Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 1973,<sup>28</sup> terhitung dimulainya pemilihan umum pada tahun 1999 sistem kepartaian di Indonesia, mengalami transformasi yang sangat drastis. Sebagaimana diketahui, selama lima kali pelaksanaan pemilihan umum,

---

<sup>28</sup> Farhan Bulkin. 1985. *Analisis Kekuatan Politik di Indonesia*. LP3SES: Jakarta. Hal 241

berturut-turut diselenggarakan sepanjang pemerintahan Orde Baru (pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), di Indonesia secara praktis hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 Golongan Karya. Pemilihan umum pada masa itu berlangsung dengan suasana yang sangat *fair* dan kompetitif, karena pengawasan pemerintah terlalu jauh dari urusan politik maupun bagian pelaksanaannya.

Pasca reformasi tahun 1998, pemerintahan transisi, berada di genggaman Presiden Habibie, kemudian melakukan berbagai transformasi, termasuk transformasi undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan umum. Kedua, produk undang-undang penting yang dibuat pada pemerintahan Habibie, kemudian dijadikan landasan hukum berlakunya sistem multi partai yang dikenal ekstrim, dalam pemilihan umum pasca orde baru dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.<sup>29</sup>

Dengan kedua Undang-Undang inilah pada tahun 1999 diadakan pemilihan umum, di era reformasi pemilihan umum pertama kali diselenggarakan. Pemilihan umum pada tahun 1999 peserta pemilihan umum diikuti sebanyak 48 partai politik dengan polarisasi ideologi yang sangat bervariasi. Penyelenggaraan pemilihan umum sendiri, dinyatakan cukup demokratis dan kompetitif. Outputnya, sebanyak 21 partai politik berhasil mengirimkan wakil-wakilnya di DPR Pusat. Dengan hasil yang didapatkan ini, sistem kepartaian (multi partai) juga diwarnai oleh konfigurasi kekuatan politik di parlemen.

Berikutnya, pada tahun 2004 pemilihan umum kembali digelar, jumlah partai politik berkurang secara drastis pada pemilihan umum hanya ada 24 partai politik yang ikut serta. Hal ini disebabkan lahirnya ketentuan yang memperberat persyaratan dimana

---

<sup>29</sup> Agus Sutisna. 2015. Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998. Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal, Vol. 2 No. 2. Hal 5

pendirian partai politik sebagai sebuah institusi yang berbadan hukum gugur dalam pemilihan umum karena tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Meskipun tidak cukup signifikan, jumlah partai politik di parlemen mengalami kemunduran yakni hanya ada 17 partai politik, dan 7 diantaranya berhasil melewati ambang batas pemilihan umum (*electoral threshold*) yang sejak itu mulai di implelementasikan.

Selanjutnya, pada pemilihan umum tahun 2009 jumlah partai politik kembali mengalami peningkatan dari 24 partai politik menjadi 38 partai politik, ditambah dengan partai politik lokal yang ada di Aceh sebanyak 6 partai politik. Dari jumlah 38 partai politik yang bersaing pada pemilihan umum yang lolos hanya 9 partai politik dan memenuhi *parliamentary threshold* yang mulai di terapkan untuk menggantikan *electoral threshold* dan dianggap “*unfair*” serta tidak cocok di laksanakan dalam masyarakat yang serba komunal dan sistem pemilihan umum proporsional di Indonesia.

Terakhir, pemilihan umum pada tahun 2014, diikuti sebanyak 12 partai politik kontestan pemilihan umum yang masing-masing berasal dari 9 partai politik yang lolos *parliamentary threshold* kemudian ditambah 2 partai lama yang berhasil melengkapi ketentuan verifikasi peserta pemilihan umum pada tahun 2014. Selain daripada itu, pemilihan umum 2014 tetap diikuti oleh 3 partai politik lokal di Aceh. Outputnya, yang lolos *parliamentary threshold* dan berhasil masuk di parlemen adalah sebanyak 10 partai politik. Kesepuluh partai ini pada tahun 2019 mendatang berhak mengikuti pemilihan umum dan sistem multi partai ekstrim tetap saja mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia di masa-masa mendatang.



### **3. Konstruksi ideal proses pencalonan anggota legislatif dalam rangka memperbaiki kapabilitas anggota legislatif di masyarakat**

Dalam rangka mencari format baru pada tahapan proses pencalonan anggota legislatif yang ideal, yakni salah satunya melakukan sebuah perubahan secara totalitas pada sistem rekrutmen politik dan pembenahan pada sistem kepartaian, kemudian pembaharuan terhadap isi undang-undang pemilihan umum terkait dengan pasal-pasal persyaratan pencalonan anggota legislatif. Dengan adanya pembaharuan pada format-format yang telah diutarakan tersebut dapat ditemukan benang merah dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang lazim terjadi pada proses pencalonan anggota legislatif.

Untuk mencapai keinginan yang menuju pada rekonstruksi sistem pencalonan dan pembaharuan pada sistem politik partai, maka partai politik bersama-sama DPR harus mendesain ulang atau menata kembali format pencalonan anggota legislatif yang ideal dalam bentuk kebijakan yang tertuang dalam undang-undang pemilihan umum, namun apabila hal tersebut memiliki proses yang berkepanjangan maka Presiden harus mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang pencalonan anggota legislatif dan di dalamnya mengatur secara rinci terkait proses rekrutmen politik, pencalonan sampai kepada tahap pemilihan umum yang dilaksanakan oleh rakyat. Di dalam peraturan perundang-undangan itu di muat kriteria secara lengkap dan terperinci serta memberikan persyaratan bagi calon dengan beban yang sangat berat layaknya seperti pencalonan hakim Mahkamah Agung. Sehingga, dengan adanya persyaratan seperti ini maka akan menumbuhkan persaingan yang *fair* dan menghindari kecurangan-kecurangan pada proses pencalonan yang nantinya akan dilakukan.

Kriteria dan persyaratan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif dituangkan dalam Pasal 51 ayat (1),

terdapat 16 persyaratan calon yang harus dipenuhi untuk menjadi calon anggota legislatif. Namun pasal-pasal yang memuat kriteria dan pengaturan persyaratan setiap calon sudah sangat tidak relevan diaplikasikan di era milenial ini, karena orang-orang yang berkualitas dan memiliki pengetahuan dibidang politik dan hukum sudah semakin banyak dan berkembang jumlahnya. Tetapi sayangnya partai politik tidak memanfaatkan orang-orang pintar untuk dijadikan calon anggota legislatifnya. Padahal jika orang-orang pintar dilibatkan dalam hal politik maka akan lahir wajah baru demokrasi pemilihan umum Indonesia yang akan membawa pada kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Adapun kriteria dan persyatan anggota legislatif telah di atur dalam Pasal 51 ayat (1)<sup>30</sup> Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Legislatif Nomor 8 Tahun 2012, dalam pasal tersebut mengatur 16 persyatan khusus yang harus dilengkapi oleh para calon, diantaranya pada huruf d dan e sudah tidak relevan untuk dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalm pencalonan anggota legislatif, seharusnya pada Pasal 51 ayat (1) huruf d dan e itu semetinya di revisi atau diperbaharui kembali. Karen pada huruf e Pasal 51 ayat (1) itu menyatakan bahwa: “cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, hal ini menjadi hal ini menjadi celah masukanya bagi siapa saja yang ingin berkehedak mencalonkan dirinya menjadi anggot legislatif sebab, kurang tidak memberikan syarat ketat terhadap calon. Semestinya Pasal 51 ayat (1) huruf d itu di ubah menjadi “cakap berbicara, menulis, menguasai bahasa indonesia dengan baik dan benar, dan menguasai *“public speaking”*. Hal ini mungkin dapat menjamin kuliatis anggota dewan serat ditambhakan untuk anggo DPR tingkat Pusat harus mampu menguasai satu bahasa internasional yakni bahasa inggris.

Sementara pada Pasal 51 ayat (1) huruf e seorang calon berpendidikan paling rendah minimal SMA atau sederajat. Pasal ini juga sudah tidak relevan di era yang

---

<sup>30</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif dalam Pasal 51 ayat (1), tentang persyaratan calon anggota legislatif.

sangat berkemajuan ini, mengingat pendidikan SMA di zaman ini sudah tidak menjadi perhitungan karena pendidikan itu dianggap sangat tidak layak untuk calon anggota legislatif. Minimal anggota legislatif tingkat Pusat adalah pendidikan S2 dengan konsentrasi pada bidang hukum, sementara, calon anggota legislatif ditingkat provinsi dan kabupaten kota minimal berpendidikan S1 yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum.

#### **4. *Fit And Proper Test* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif**

Pada perinsipnya *fit and proper test* digunakan sebagai instrumen untuk mencari orang-orang yang layak menjadi pemimpin bangsa. Alasannya, karena *fit and proper test* salah satu perimadona yang menjadi alat untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas dan tanggungjawab dalam memimpin sebuah institusi organisasi pemerintahan. Uji kompetensi lahir untuk mengejawantahkan segala bentuk perbuatan curang dalam pengangkatan dan pencalonan pejabat negara, baik pejabat strukturan, pejabat fungsional maupun pejabat publik atau yang disebut pejabat politik. Atas dasar inilah *fit and proper test* diagkan sebagai sarana untuk menyeleksi para calon pejabat negara, agar dapat diketahui semua aspek yang ada pada diri masing-masing calon pejabat. Kemudian juga, uji kompetensi ini dijadikan instrumen untuk mengantisipasi perbuatan curang mengotak-atik (*garrymandering*) bentuk aktivitas pencalonan yang diselenggarakan oleh berbagai institusi dalam setiap pencalonan pejabat negara.

Seiring perjalanan bangsa Indonesia, *fit and proper test* telah dikenal sejak berdirinya negara Indonesia, hal ini digunakan dalam memilih pemimpin-pemimpin yang berdasarkan pada perinsip kualitas dan integritas dari masing-masing kandidat yang dicalonkan. Tujuannya adalah bukan untuk menggugurkan syarat atau kriteria dari calon dari para calon yang diusulkan, namun diantara mereka pasti ada yang diunggulkan

sehingga siapa yang mempuni dan layak maka dialah yang di pilih dan berhak untuk menduduki suatu jabatan yang perebutkan secara sah menurut konstitusi.

Pernyataan di atas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis, bahwasanya setiap pencalonan anggota legislatif juga perlu di implementasikan uji kompetensi atau *fit and proper test* terhadap semua calon wakil-wakil rakyat, sehingga ada keseimbangan (*check and balances*) antara pencalonan aksekutif dan yudikatif dan ini merupakan perwujudan persamaan dimuka hukum (*aquality before the law*).

**a. Regulasi yang mengatur *fit and proper test***

Sejauh ini pengaturan *fit and proper test* terhadap pencalonan anggota legislatif belum ada suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Maka dari itu, sudah semestinya regulasi itu dibuat oleh DPR bersama Pemerintah guna mengantisipasi pencalonan yang tidak berkualitas. Hal yang dimaksudkan adalah perlunya pembentukan undang-undang yang mengatur tentang pencalonan anggota legislatif secara eksplisit mulai dari kriteria, persyaratan sampai kepada tes uji kompetensi terhadap calon-calon anggota legislatif.

Namun dalam hal ini pembuatan undang-undang yang dimaksud di atas tidak serta merta dapat tercapai seketika, butuh waktu, tenaga dan anggaran yang cukup banyak untuk mengundang sebuah sistem politik terkait mekanisme pencalonan anggota legislatif tersebut. Tetapi, hal ini Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Fit And Proper Test terhadap Pencalonan Anggota Legislatif, sehingga dalam sistem rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dapat terarah, futuristik dan dapat menghasilkan manusia-manusai yang berjiwa kenegaran dan trampil menjadi pemimpin bangsa yang dapat membawa perubahan, baik dalam segi pemerintahan maupun penyuaran aspirasi rakyat. Dengan terbitnya aturan yang penulis

kemukakan itu, proses pencalonan anggota legislatif lebih mengarah kepada pemilihan demokratis dan ada ruang bagi masyarakat dalam memilih wakilnya.

**b. Tim penyeleksian calon Anggota Legislatif**

Tim seleksi atau yang di kenal dengan panitia seleksi (pansel) adalah tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang uji kompetensi "*fit and proper test*" terhadap calon anggota legislatif. Tim seleksi ini berasal dari akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat. Dengan adanya tim ini diharapkan dalam pemilihan anggota legislatif dapat membawa perbaikan terhadap kapabilitas, integritas, dan loyalitas para anggota legislatif, dan dengan menekankan pada prinsip keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Tim ini mempunyai badan hukum dan jelas dan dibentuk sebagai sebuah institusi yang otonom berada dibawah instruksi pemerintah. Sehingga lembaga ini mempunyai dana yang bersumber dari APBN dan APBD dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi yang bewenang menyeleksi calon-calon anggota legislatif yang diusulkan oleh partai politik terkait. Sehingga keberadaan institusi ini tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun dalam hal tugas dan kewenangannya. Lembaga ini berdiri sendiri dan bersifat "independen" dalam mengemban tugasnya.

Dengan kehadiran lembaga tersebut, tim seleksi dapat bekerja lebih ekstra dan kompetitif dalam mencetak generasi terbaik bangsa yakni menyeleksi para calon anggota legislatif mulai dari kelengkapan berkas administratif dan kelengkapan teknis, serta uji kompetensi terhadap calon-calon anggota legislatif. Sehingga para calon legislatif tersebut apabila terpilih dapat mengemban tugasnya dengan bijaksana.

## 5. Komparasi Pengangkatan Pejabat Negara dilingkungan Institusi Yudikatif

Untuk tercapainya akselerasi penerapan *fit and proper test* dalam pemilihan calon anggota legislatif, dengan ini penulis mencoba melakukan sebuah pendekatan perbandingan (*comparacy approach*) menyangkut pengakatan hakim dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), hal ini dijadikan sebagai sebuah parameter untuk di implementasikan di lingkungan partai politik dalam rangka mengangkat atau mencalonkan kandidat nya sebagai calon anggota legislatif menuju daperlemen.

Dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri, dalam penyeleksian hakim sangat ketat sekali dilakukan. Pada pertengahan tahun 2017 panitia seleksi Mahkamah membuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri sebagai cakim (calon hakim) dilingkungan Mahkamah Agung. Adapun jumlah yang mendaftar pada saat itu sebanyak 25.358 peserta. Peserta yang mendaftar mengikuti tiga tahapan diantaranya adalah *pertama*: seleksi berkas administrasi, *kedua*: seleksi kompetensi dasar (SKD), dan *ketiga* adalah seleksi kompetensi bidang (SKB) yang terbagi atas kompetensi bidang hukum menggunakan CAT (*Computer Authorized Test*),<sup>31</sup> psikotes dan wawancara, penilainnya dilakukan dengan perentasi yang cukup tinggi.

Tiga tahapan tes tersebut dilakukan dengan melibatkan penguji sebanyak 87 akademisi dari perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM dan Unair. Ada pula perguruan tinggi swasta yang berpartisipasi yaitu Universitas Parahyangan, Bandung. Terkait kelulusan sangat tergantung dari kemampuan peserta dalam melewati tiga tahapan tes tersebut. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, AchmadSetyo Pudjoharsoyo, saking ketatnya seleksi penilaian sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Baca berita terkait pencalonan hakim yang diseleksi oleh hakim, yang dimuat dilaman <https://news.detik.com> pada hari jum'at , tgl 27 Oktober 2017.

<sup>32</sup>Putu Merta Surya Putra. 2017. *MA: Rekrutmen Calon Hakim Ketat, Banyak Anak Pimpinan Tak Lolos*, dikutip dari <https://www.liputan6.com> pada tgl 27 Juli 2018.



*"Presentasinya itu 40 persen SKD dan 60 persen SKB. Seperti psikotes kemudian wawancara yang nilainya 50 persen dan CAT yang 50 persen juga (komposisinya). Semuanya sudah komputerisasi dan untuk kegiatan tahap pertahap itu ada pengawasnya. Kalau jumlahnya sekian, bagaimana orang yang mengaku bisa membantu. Bagaimana caranya,"*

Peresentasi di atas menunjukkan bahwa betapa ketatnya seleksi penerimaan hakim dilingkungan Mahkamah Agung, sampai-sampai anak dari pimpinan Mahkamah Agung sendiri tidak lolos dalam tes calon hakim tersebut. Dari total peserta yang mendaftar 25.358 orang yang diterima hanya 1.684 orang.<sup>33</sup>

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah mengatakan: *"Ini sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung benar-benar ingin mendapatkan SDM yang berkualitas, diseleksi secara jujur, akuntabel dan transparan. Tidak ada sedikit pun unsur KKN di sini,"*. Karena dalam penyeleksian calon hakim Mahkamah Agung selain melakukan penilaian *profil assesment* juga melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga dalam rekrutmenya tidak ada tawar-menawar meskipun sogokannya cukup tinggi, namun tidak mempengaruhi proses penyeleksian calon hakim. Dalam penyeleksiannya benar-benar mengedepankan kejujuran dan kepribadian yang menunjukan pada kualitas dan integritas hakim sebagaimana yang di cita-citakan pada Pasal 24A ayat (2) UUD 1995, bahwa: *"Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum"*.<sup>34</sup>

Integritas harga mati! Adalah nilai tertinggi yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dalam mencari sosok hakim agung yang ideal. Bukan sekadar memiliki ilmu, memiliki kecakapan dalam bekerja, lebih jauh integritasnya lah yang menentukan layak tidaknya

---

<sup>33</sup> Lihat berita yang dimuat pada laman <https://economy.okezone.com>

<sup>34</sup> Komisi Yudisial. RI. 2016. *Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Penerbit: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

seorang hakim menggenggam palu keadilan untuk menentukan nasib masyarakat luas serta menyandang gelar yang mulia.<sup>35</sup>

Komparasi yang penulis lakukan bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam sistem rekrutmen legislatif guna mewujudkan sistem demokrasi yang baik dan berkualitas. Penyeleksian hakim Mahkamah Agung yang telah penulis uraikan di atas menunjukkan bahwa betapa beratnya posisi menjadi hakim, sehingga tidak cukup mengandalkan kemampuan kerja namun juga dibutuhkan intelektuan, kapasitas, integritas, moralitas, dan religuitas dalam mengemban amanah sebagai pengendali keadilan dalam memutuskan nasib warga negara.

#### **6. Koalisi partai politik permanen secara vertikal-horizantal**

Gagasan terkait pencanangan koalisi partai politik permanen secara vertikal-vertikal dari pusat sampai ke daerah ini, merupakan langkah baru untuk menekukan *will-solution* atau benang merah terhadap pencalonan anggota legislatif. Mungkin hal ini menjadi bagian dari perbaikan sistem demokrasi yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dimana proses pencalonan anggota legislatif harus direkonstruksi atau diperbaharui secara totalitas.

Jadi, sistem koalisi partai permanen yang dimaksudkan adalah untuk menyederhakan sistem pencalonan. Pencalonan dilakukan harus berdasarkan pada masing-masing dapil atau pencalonan sistem distrik, sehingga seberapa banyak orang yang mewakili dapil tersebut maka sebanyak itu pula yang direkrut untuk dicalonkan oleh masing-masing partai dengan melakukan koalisi terlebih dahulu di internal partai politik untuk menentukan calon-calon yang berbakat dan berjiwa kenegaraan serta yang pantas untuk dijadikan panutan ummat. Tidak cacat hukum dan tidak tercelah kepribadiannya, memiliki pendidikan, track record, dan meritokrasi yang baik. Artinya,

---

<sup>35</sup> Hal ini disampaikan pada sambutan Tim Redaksi Komisi Yudisial dan dimuat pada Media Infoemasi Hukum dan Pradilan Komisi Yudisial, di kutip dari Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), pada tgl 27 Juli 2018.

masing-masing partai harus mempersiapkan calon sesuai kebutuhan dapil yang akan mewakili daerah tersebut. Contohnya, sebagai berikut: *Kota Malang memiliki kuota anggota legislatif sebanyak 6 orang, maka masing-masing partai politik harus mempersiapkan 6 orang calon yang akan mewakili distrik tersebut.*<sup>36</sup> Kemudian senada dengan hal itu, setiap partai politik yang melakukan koalisi harus mencari calon yang akan mewakili dari koalisi partai tersebut melalui konvensi calon-calon anggota legislatif yang dilakukan oleh panitia seleksi pencalonan anggota legislatif. Apabila hal ini dapat terwujud maka kualitas demokrasi akan semakin meningkat pada puncak kulminasi yang baik dan kompetitif, serta hal ini dapat mempekecil polarisasi calon.

Artinya pencalonan nya efektif tidak membutuhkan biaya mahal, dan calonnya tidak terlalu banyak cukup melakukan konvensi terhadap calon yang akan di calonkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing distrik atau daerah pemilihan (dapil). Dan calon yang diusung tersebut akan mewakili partai yang telah berkoalisi. Ini dilakukan mulai dari pusat sampai ke daerah secara linear guna menciptakan politik sehat dan demokrasi yang ideal dalam rangka mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

## **KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada serangkaian hasil dan pembahasan tesis di atas, bahwa ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang atau *rekonstruksi* dalam pemilihan anggota legislatif, tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem ketata-negaraan, khususnya perbaikan pola rekrutmen politik pemilihan calon anggota legislatif. Dengan demikian penulis menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Masukan dan saran terkait koalisi parpol permanen guna memperbaiki sistem demokrasi pemilihan anggota legislatif. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Mokh. Najih, Ph.D selaku Ketua Program Pascasarja Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

- a. Konsep uji kompetensi (*fit and proper test*) pencalonan anggota legislatif diharapkan dapat memperbaiki sistem rekrutmen politik di masa yang akan datang dan dapat diaplikasikan oleh partai politik. Tujuannya adalah untuk menyeleksi dan mencari calon-calon yang mempunyai bakat keilmuan dan pengetahuan, terutama memilih orang-orang yang punya kapabilitas dan integritas.
- b. Untuk mengentaskan problematika dalam pencalonan anggota legislatif maka perlu *rebranding* atau *redesain* terhadap pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, dan kemudian sistem perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum anggota legislatif yakni UU No. 8 Tahun 2017 harus di rekonstruksi atau direvisi ulang guna menata konstelasi pencalonan anggota legislatif kepada pemilihan yang demokratis sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
- c. Setiap proses pencalonan anggota legislatif, para calon harus melewati beberapa tahapan seleksi yang meliputi: penilaian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kompetensi (*fit and proper test*) yang terdiri atas pembuatan makalah, pemaparan makalah, test wawancara, tes psikologi, dan penentuan urutan calon, serta mengumumkan hasil penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi yang dimaksud adalah panitia yang dibentuk berdasarkan perpres atau peraturan DPR yang tertuang dalam Tata Tertip Pencalonan Anggota Legislatif. Tidak hanya itu, dalam proses pencalonan yang diselenggarakan oleh panitia seleksi harus melibatkan partisipasi publik guna mengantisipasi ketidakpercayaan dan kontroversi di masyarakat.

## **2. Rekomendasi**

- a. Demi mewujudkan negara yang demokratis dan berdaulat terhadap pemilihan calon anggota legislatif maka, dengan ini diharapkan kepada Pemerintah dan DPR untuk dapat menyusun dan merancang sebuah aturan perundang-undangan yang mengatur

tentang rekrutmen calon anggota dewan. Tujuannya adalah untuk memilih anggota masyarakat yang memiliki pengalaman organisasi, pengetahuan yang luas, kapabilitas, loyalitas dan integritas. Pemilihan ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pemilihan umum dilaksanakan.

- b. Dalam rangka menciptakan demokrasi yang ideal maka harus dilakukan pembenahan pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Legislatif yang didalamnya harus di muat syarat-syarat menjadi calon anggota legislatif, diantaranya: a. syarat administrasi, berupa pembuatan makalah dan orientasi visi dan misi nya, b. memuat tes uji kompetensi, berupa tes kemampuan dasar, kemampuan bidang, dan tes psikologi bagi bakal calon anggota legislatif. Sehingga dengan aturan tambahan ini dapat memperbaiki kualitas anggota legislatif.
- c. Diharapkan dalam pencalonan anggota dewan yang dilakukan oleh partai politik di setiap daerah pemilihan harus dibatasi yakni dengan menggunakan metode pemilihan distrik dimana dalam satu dapil dicalonkan oleh partai koalisi yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mencalonkan siapa saja yang berkompeten dan mampu membawa perubahan yang terbaik bagi masyarakat dan juga bagi partai politik yang mengusungnya dari gabungan partai koalisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmad Muliadi. 2013. *Politik Hukum*. Jakarta, Penerbit: Akademia Permata.

Ari Wibowo dkk. 1996. *Mendemokratiskan Pemilu*, Jakarta: Elsam.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2009. *“Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika.

Farchan Bulkin. 1985. *Analaisis Kekuatan Politik di Indonesia*. LP3SES: Jakarta

Fanindita, Fania. Tanpa Tahun. *Rekrutmen Politik terhadap Perempuan Dalam Partai Politik dan Parlemen*. Medan

- Jimly Asshiddiqie, 2008. *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, Jakarta: PT. Buana Indah Populer.
- Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial, Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2015
- Lexi Moeloeng, (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Mariam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta
- Mukti fajar dan Yulianto Achamad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moh. Kamaludin. 2017. *Rekonstruksi Pengaturan Tentang Pelacuran Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang
- M.N. Marbun, 1996. *Kamus politik*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Muhadam Labodo dan Teguh Ilham, 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo, 1992. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Novianto. M. Hantoro. 2015. *Akseptabilitas politik dalam Seleksi Calon Pimpinan KPK*, Penerbit: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- ....., 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Putra, Fadillah. *Kebijakan Publik Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Putra, Fadilla. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zaenal Arifin, 2005. *Tim Pengkaji Hukum Tentang Fit And Proper Tes Dalam Menyeleksi Pejabat Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

#### **Jurnal:**

- Abdul Rokhim. 2011. *Pemilihan Umum Dengan Model "Parliamentary Threshold" Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7. No. 14
- Agus Sutisna. 2015. *Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Pasca Reformasi 1998*. Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal, Vol. 2 No. 2
- Ahmad Riyad U.B. 2015. *Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo*, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No 2.

- Dian Aulia. 2016. *Pengaturan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi*, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1) Juni 2016.
- Efi Yulistyowati, dkk. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2.
- Hezky Fernando Pitoy, 2014. *Mekanisme checks and balances antara presiden dan dpr dalam sistem pemerintahan presidensial di indonesia*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 5/Juni/2014
- Ishaq, dkk. 2013. *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Dpc Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014*, Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. III, No. 2 Oktober 2013.
- Komisi Yudisial. RI. 2016. *Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Penerbit: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.
- M. Syamsudin. 2011. *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011.
- Muhammad Eko Admojo. 2016. *Analisa Proses Promosi Aparatur Sipil Negara Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Struktural Eselon II di Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta*, Jurnal Aristo, Vol. 4. No. 2.
- Rogaiyah, 2009. *Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan atau Melahirkan Kesenjangan*. Jurnal PPKn dan Hukum, Vol. 1. No. 4.
- Rhanty Syefira Salsabila. 2016. *Pola Rekrutmen Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Pekanbaru Tahun 2014*. JOM Fisip. Vol. 3. No. 2.
- Shanti Dwi Kartika. 2017. *Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 06/II/Puslit/Maret/2017

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Legislatif/Konstituante Oleh Anggota Perang dan Pernyataan Nonaktif/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan Pencalonan Keanggotaan tersebut, Maupun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilihan Umum Terhadap Anggota Angkatan Perang.

**Website:**

Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2017. Perppu No. 1 Tahun 2017 Miliki Kelemahan, dikutip <http://dpr.go.id/>, diakses pada tanggal 24 April 2018

Hardani Triyoga. 2015. *Beda DPR dari Masa Sukarno, Soeharto dan Reformasi*. Retrieved Desember 27, 2017 from <https://news.detik.com>.

Politik Indonesia. 2011. *Kelemahan Sistem DPR Bawa Petaka*, <http://www.politikindonesia.com>, diakses pada tanggal 24 April 2018

Suara KPU. 2014. Benang Merah Uji Publik Suara KPU. Dikutip dari [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id). Pada tanggal 11 Juli 2018.

Z. Efendei, 2012. *Proposan Tesis S2 Undip*, Retrieved Desember 27, 2017 from <http://eprints.undip.ac.id>.

Putu Merta Surya Putra. 2017. *MA: Rekrutmen Calon Hakim Ketat, Banyak Anak Pimpinan Tak Lolos*, dikutip dari <https://www.liputan6.com> pada tgl 27 Juli 2018.

Media Informasi Hukum dan Pradilan Komisi Yudisial, di kutip dari Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), pada tgl 27 Juli 2018

## CURRICULUM VITAE



Penulis di lahirkan di Desa Sembilan, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pada tanggal 08 Juni 1993, penulis merupakan anak kedua dari tujuh orang bersaudara dari pasangan perkawinan Bpk. Alm. Ali Rahman dan Ibu Darni. Penulis Menempuh studi mulai dari Sekolah Dasar di SDN 4 Simeulue Barat lulus tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Simeulue Barat lulus tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sinabang Simeulue Timur lulus pada tahun 2011, dan menamatkan Pendidikan SI (Sarjana Hukum) di Universitas Islam Djakarta pada tahun 2015. Selanjutnya penulis pernah bergelimang dan aktif di organisasi baik di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan oraganisasi paguyuban lainnya. Selain itu juga penulis pernah menggeluti berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya baik nasional, regional maupun internasional, kemudian pernah mengikuti latihan kader I (Basic Training) Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2011, Magang Wirausaha Kementrian UKM dan Koprasi tahun 2011, Pemantapan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan bagi pemuda angkatan VIII Lemhannas RI tahun 2014 dan Latihan Kader II (Intermediate Training) Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 2015. Jabatan yang pernah diduduki dalam organisasi sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Islam

Djakarta Periode 2013-2014, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam  
Komisariat Universitas Islam Djakarta Periode 2013-2014, Ketua Majelis  
Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Islam Djakarta Periode  
2014-2015, Koordinator MPK-PK HMI Komisariat UIJ Perode 2014-2015  
Ketua Umum Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Jakarta Raya (Komp  
Jaya) Periode 2015-2017, Sekretaris II Cabang Taman Iskandar Muda  
Matraman Jakarta Timur, Ketua Bidang Kajian dan Keilmuan Forum Kajian  
Mahasiswa Pascasarjana Aceh - Malang (FORKAMAPA - Malang) Periode  
2017-2018.

